Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Impact Against the Law in Corruption

Wessy Trisna*, Ridho Mubarak

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*corresponding author: email : wessytrisna@staff.uma.ac.id

Abstrak

Korban merupakan seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. Korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi masyarakat dan rakyat serta dapat juga pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Selama ini Dalam menangani kasus korupsi, yang selalu disoroti adalah oknum pelaku dan hukum, sedangkan korban jarang sekali untuk diperhatikan sehingga perlu diketahui kedudukan korban dalam kasus korupsi dan perlindungan korban terkait kasus tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korban, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The victim is a person individually or jointly suffers harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or damage to his / her basic rights, caused by the actions of another party that violates the criminal law in a country either intentionally or by negligence. Victims in corruption cases are divided into 2 (two) namely: direct victims (State) and indirect victims. Indirect victims include the community and the people and can also a third party, this is because the financial losses of the state or the state economy, will indirectly harm the interests of society and the interests of the people. During the handling of corruption cases, which always highlighted is the actors and the law, while the victim is rarely to be noticed so it is necessary to know the status of victims in cases of corruption and protection of victims related to corruption cases.

Keywords: Victims, Corruption

How to Cite: Trisna, W., Ridho M., (2017), Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Administrasi Publik*, 7 (1): 117-126.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh masyarakat maupun negara, disebabkan dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara dan merusak perkembangan *good governance*. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dampak pada kehidupan ekonomi berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karenanya tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).

Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang ditetapkan dalam Konvensi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Vienna, tanggal 7 Oktober 2013, dilakukan oleh seseorang yang terhormat, berkuasa, memiliki kewenangan dan korbannya tidak kentara. Secara sosiologis, sifat korupsi pun merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (Marwan Mas, 2014 : 2).

Menurut Syaiful Bakhri (2009 : 281), masyarakat dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa kerugian Negara dan perekonomian Negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan sebagainya. Secara umum, ada beberapa macam bentuk korupsi yang sering ditemukan didalam praktik antara lain penyuapan (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), spekulasi (*speculation*), dukungan dan nepotisme

(*patronage and nepotism*), dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Korban tindak pidana korupsi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung yaitu korban yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah Negara. Sedangkan korban tidak langsung dapat dibagi dua yaitu korban tidak langsung *an sich*, dan korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Korban tidak langsung tindak pidana korupsi adalah masyarakat dan rakyat, sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dibagi tiga yaitu orang yang diberitakan, masyarakat, dan wartawan yang memberitakan (Jusup Jacobus setyabudhi, 2013 : 3).

Masyarakat pada umumnya sepakat pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum dan diberikan sanksi seberat-beratnya, agar timbulnya efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, harapan efek jera ini juga ditujukan agar masyarakat secara individu maupun kolektif tidak melakukan tindak pidana korupsi, tapi apakah pemberian sanksi yang seberat-beratnya adalah solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakikatnya hukum bukan hanya melihat beratnya sanksi yang diberikan, tapi bagaimana hukuman tersebut dapat memberikan efek jera.

Dalam hal penjatuhan pidana dalam kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat

dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun jenis penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi adalah berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.

Penerapan sanksi hukuman bagi tindak pidana korupsi mengenai hukuman mati terdapat didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga membuktikan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi memang sudah cukup maksimal, namun hukum kiranya bukan hanya meletakkan sanksi hukuman diatas segalanya tapi bagaimana hukum mampu melindungi tujuannya untuk melindungi masyarakat, dalam hal ini juga termasuk masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korupsi disamping Negara dan korporasi (BUMN).

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dapat mengalami kerugian ialah masyarakat luas. Sehingga negara kemudian mengambil alih proses pembalasan (penghukuman) kepada pelaku karena dianggap telah merusak tatanan masyarakat luas. Negaralah yang memonopoli hak penuntutan kepada pelaku (*dominus litis*) sekaligus mewakili pihak korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku. Dalam kaitannya dengan masalah korban, hal ini menimbulkan penafsiran bahwa korban akibat tindak pidana korupsi ialah masyarakat luas, Jika kita merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang disebut korban tindak pidana korupsi adalah

negara. Sehingga negara kemudian mengambilalih proses pembalasan (penghukuman). (Hukum.kompasiana.com, diakses pada tanggal 11 Nopember 2017).

Dalam menangani kasus korupsi, yang selalu disoroti adalah oknum pelaku dan hukum. Selama ini analisis kerugian korupsi lebih berfokus pada analisis kerugian negara, dan yang selalu dibicarakan berapa nilai kerugian keuangan negara, bagaimana membuktikan, dan bagaimana mengembalikan uang dan aset yang dicuri ke kas negara. Namun pemerintah/Negara kurang memperhatikan pada kerugian sosial yaitu kerugian yang terjadi dan dipikul masyarakat (juga lingkungan hidup), baik perorangan, kelompok warga, maupun komunitas, termasuk di dalamnya kerugian pada perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, dan marginal lainnya. Dalam praktik penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai saksi korban dan terkadang mengabaikan posisi korban sebagai pencari keadilan.

Putusan pengadilan jarang memandang tentang korban tindak pidana, banyak putusan pengadilan yang perannya hanya menghukum si pelaku tetapi tidak memandang/melindungi korban itu sendiri. Dalam hal terjadi tindak pidana korupsi, hampir semua pengadilan dimana hakim hanya memvonis si pelaku tetapi tidak mengembalikan kerugian negara, kalau hal ini yang dilakukan oleh pengadilan, maka putusan hakim itu masih bersifat abstrak atau fakultatif padahal hukum itu sifatnya konkrit (limitatif) yang seharusnya setiap putusan pengadilan itu harus mengadopsi sifat fakultatif dan limitatif, sifat fakultatif tercermin dari putusan itu hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi sifat limitatifnya yang berupa perlindungan

hukum atau dalam bentuk ganti rugi terhadap korban terlupakan.

PEMBAHASAN

Kedudukan Korban Didalam Dan Diluar KUHAP

Kedudukan korban merupakan komponen penting dalam sebuah kasus mengadili satu tindak pidana. Korban adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan meliputi penderitaan fisik maupun mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melanggar penyalahgunaan kekuasaan (Arif Gosita, 1993 : 46).

Pada umumnya hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan, sehingga korban adalah pihak yang dirugikan. Korban kejahatan dapat diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (Rena Yulia, 2010:51). Ada beberapa penyebab seseorang menjadi korban yaitu: kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban (Bambang Waluyo, 2014:19).

Mandelson mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahan, yaitu (C. Maya Indah S, 2014:35):

Korban sama sekali tidak bersalah;

Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.

Korban sama salahnya dengan pelaku.

Korban lebih bersalah daripada pelakunya.

Korban adalah satu-satunya yang bersalah.

Korban pura-pura dan korban imajinasi.

Namun, berdasarkan hal tersebut banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Menurut H.S. Brahmana (2015:54) menyatakan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan dimana kondisi ini berimplikasi pada dua hal fundamental yaitu:

Belum ada perlindungan hukum bagi korban dan

Putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.

Penentuan kerugian Negara yang digunakan hakim dalam pertimbangan persidangan tindak pidana korupsi banyak menimbulkan perdebatan, baik dari aspek

filosofis pendekatan perhitungan maupun implementasi pengambilan putusan. Putusan hakim harus memiliki nilai keadilan dan nilai hukum. Kedua nilai tersebut sama pentingnya, ibarat dua sisi mata uang sehingga pihak-pihak yang berkepentingan akan terlindungi haknya dengan adanya putusan tersebut.

Siswanto Sunarso (2012:49) menyatakan kedudukan korban didalam KUHP tampaknya belum optimal hal ini dijelaskan sebagai berikut:

KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak menjelaskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.

Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkutat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakangi sebagaimana dikatakan oleh Hebert Parker dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offence*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).

KUHP menganut aliran neo klasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan bagi pelaku tindak pidana

dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur, dan sebagainya. Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan karena KUHP yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi terhadap pelaku disebut sebagai konsep *retributive justice* (pembalasan). Korban dalam sistem hukum pidana digunakan sebagai sistem pembuktian dalam peradilan umum, dimana merupakan sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).

Terbitnya undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus dalam undang undang di luar KUHP dan KUHP telah mengatur beberapa hak korban kejahatan yang kemudian hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tertuang dalam Pasal 5 (ayat 1) berbunyi sebagai berikut:

memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

memberikan keterangan tanpa tekanan;
mendapat penerjemah;
bebas dari pertanyaan yang menjerat;
mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
dirahasiakan identitasnya;
mendapat identitas baru;
mendapat tempat kediaman sementara;
mendapat tempat kediaman baru;
memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
mendapat nasihat hukum;
memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
mendapat pendampingan.

Hak-hak tersebut diatas diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus tertentu yang salah satunya adalah korban tindak pidana korupsi. Kedudukan korban dalam tindak pidana korupsi selama ini kita amati hanya sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan hak-haknya adalah kecil.

Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immateriil bahkan berakibat korban menderita cacat seumur hidup maupun meninggal dunia (Abdussalam, 2010:273). Untuk

meniadakan atau mengurangi penderitaan korban dalam hal ini korban atas tindak pidana korupsi, maka korban tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari segi kemanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/ bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.

Perlindungan korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang diklasifikasikan sebagai korban. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku.

Adanya perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan (*desiderata*) oleh korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Dalam tindak pidana korupsi selain negara yang menjadi korban langsung juga terdapat masyarakat sebagai korban tidak langsung sehingga masyarakat juga wajib diberikan perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah dengan diwujudkannyanya aturan serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada hak dasar yang diamanatkan UUD 1945 (Sri Hartini, *et al.*, Vol. 12 No. 03, 2012:9).

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada

hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak korban. Hal ini karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan demikian dalam hal ini sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dimana dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual terkandung perlindungan korban secara tidak langsung (Barda Nawawi Arief, 2005:83-84).

Proses pengadilan bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi tidak selalu memberi keputusan yang memberikan kompensasi pada korban. Asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri Negara hukum, demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban wajib dilindungi (Bambang Waluyo, 2014:34)

Perlindungan hukum terhadap korban sering terabaikan dimana aparat penegak hukum lebih kepada menghukum si pelaku

tidak memandang tentang korban itu sendiri sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi korban. Kegagalan menegakkan keadilan menurut Muladi (2002:274) disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Perlakuan yang tidak adil. Beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat hukum di bawah standar profesi, atau kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis.

Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum.

Tidak adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang tidak salah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.

Perlakuan yang merugikan dan tidak proporsional terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.

Hak-hak orang lain (baik korban aktual maupun potensial) tidak dilindungi secara efektif dan proporsional oleh Negara. Hal ini ditujukan terhadap keamanan umum yang secara preventif menjadi tanggung jawab polisi.

Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, begitu juga kepada korban tindak pidana korupsi. Dalam konteks tindak pidana korupsi, tersangka perbuatan korupsi harus dijamin hak-hak dan rasa keadilanannya, namun yang lebih penting

dari itu hak-hak dan rasa keadilan dari para korban tindak kejahatan lebih diutamakan.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara. Didalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban.

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana korupsi merupakan upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban. Perlindungan hukum korban kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Dikdik M. Arief Mansur, et.al., 2007:166). Perlindungan Terhadap Korban menurut Barda Nawawi dapat dilihat dari dua makna yaitu:

Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang);

Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan /kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan permintaan maaf), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Pemberian perlindungan hukum kepada korban didasarkan pada asas dan tujuan sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Pasal 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 menjelaskan mengenai asas-asas perlindungan korban

yang berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan terhadap korban karena yang bersangkutan mempunyai hak yang harus dilindungi dan kewajiban yang harus dipenuhi (<http://akuntansiuntuksemua.blogspot.com/2011/05/kejahatan-perbankan.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 Nopember 2017).

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya-tidaknya memberikan perlindungan terhadap korban (perseorangan, masyarakat dan negara) yaitu dalam bentuk berikut (Bambang Waluyo, 2014:61-63):

Pembayaran Uang Pengganti

Pembayaran uang ini kepada negara sebesar uang negara yang dikorupsi atau yang terbukti di korupsi terpidana. Selain hukuman pokok dan hukuman tambahan yang lain, terpidana dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti kepada negara terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peran Serta Masyarakat

Mengingat tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat bangsa dan negara, kepada masyarakat dapat berperan serta membuat upaya pencegahan dan pemberantasannya. Peran serta tersebut diantaranya diwujudkan dalam bentuk-bentuk hak-hak perlindungan hukum dan penghargaan (Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Hak masyarakat

Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana.

Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Memperoleh perlindungan hukum

Perlindungan hukum bila melaksanakan hak-hak seperti tersebut diatas (hak mencari dan seterusnya, hak untuk memperoleh pelayanan dan seterusnya, serta hak menyampaikan saran dan seterusnya).

Dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban/tanggung jawab

Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penghargaan

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan,

pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi (Pasal 42 ayat (1))

SIMPULAN

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan karena KUHP yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi terhadap pelaku disebut sebagai konsep retributive justice (pembalasan). Sehingga kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Korban dalam sistem hukum pidana digunakan sebagai sistem pembuktian dalam peradilan umum. Sama halnya dalam kasus korupsi, Kedudukan korban hanya sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan hak-haknya adalah kecil. Hal ini disebabkan karena penentuan kerugian Negara yang digunakan hakim dalam pertimbangan persidangan tindak pidana korupsi banyak menimbulkan perdebatan, baik dari aspek filosofis pendekatan perhitungan maupun implementasi pengambilan putusan. Karena hampir semua pengadilan dimana hakim hanya memvonis si pelaku tetapi tidak mengembalikan kerugian negara, kalau hal ini yang dilakukan oleh pengadilan, maka putusan hakim itu masih bersifat abstrak atau fakultatif padahal hukum itu sifatnya konkrit (limitatif) yang seharusnya setiap putusan pengadilan itu harus mengadopsi sifat fakultatif dan limitatif, sifat fakultatif tercermin dari putusan itu hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi sifat limitatifnya yang berupa perlindungan

hukum atau dalam bentuk ganti rugi terhadap korban terlupakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Viktimologi, Jakarta, PTIK, 2010.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Waluyo, B. 2014. *Victimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), *Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, Mercatoria, 1 (2): 130-140
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), *Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, Mercatoria, 1 (2): 150-162
- Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)*, Mercatoria, 3 (2): 88-101
- Hidayat, dan Ediwarman, (2013), *Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI)*, Mercatoria, 6 (1): 44-63
- Junjungan, M., Marlina, (2013), *Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu)*, Mercatoria, 6 (2): 117-132
- Kejahatan Dan Teori Penanggulangannya), Ratu Jaya, Medan, 2015.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, 2009.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Jusup Jacobus setyabudhi, *Makalah Aspek Korban Dalam Pemberitaan Pers Tentang Korban*, dalam Simposium Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi Kerjasama Fakultas Hukum UNHAS dan MAHUPIKI, Makassar, tanggal 18-19 Maret 2013, halaman 3.
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat dan Rahadi Wasi Bintoro, *Model Perlindungan Hukum terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 03, September 2012.
- <http://hukum.kompasiana.com/2015/02/20/tindak-pidana-korupsi-dari-tinjauan-viktimologi-702771.html>, diakses pada tanggal 11 Nopember 2017.
- <http://akuntansiuntuksemua.blogspot.com/2011/05/kejahatan-perbankan.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 Nopember 2017.
- H.S. Brahmana, *Kriminologi dan Victimologi (Menjelajah Masalah Kejahatan, Korban*